

# TANTANGAN KONTEMPORER BANGSA INDONESIA : RESPON DUNIA PENDIDIKAN

Djohar

## ABSTRACT

*The problems of the educational policy in response to the contemporary challenge in Indonesia are coincided with three issues: (1) the educational response to globalisation and market liberalisation, (2) the educational response to territorial autonomy, and (3) the educational institution capacity in improving the educational quality. In the last 30 years, education system in Indonesia has been too centralized, uniformed and had only single standard. It tended to neglect the diversity of communities, areas and cultures. To resolve urrent issues, education has to be understood as a societal responsibility, encompassing governments, families, communities and organizations. It requires commitment and participation of all, that all elements of communities should be regarded as 'educational instruments'.*

*In relation to the issues in local autonomy policy, attention has to be given to some principles in education: 1) it should not only be elucidated as a power shift from the central to the local government, but it should be linked closely to democracy, 2) flexibility in implementing any government policy, and (3) in response to the global issues, local governments have to be able to build collaborative networks with institutions in foreign countries. With regards to institutional capacity building, local stakeholders must work together in a "School Based Management" system.*

**Keywords:** *education policy, educational instruments school-based management system*

## PENDAHULUAN

Tantangan kontemporer ini tidak hanya terbatas pada tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saja, akan tetapi juga tantangan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia, khususnya dengan terjadinya tarik menarik di berbagai hal kehidupan. Tarik menarik itu terjadi antara kekuatan yang menguasai industri dengan kekuatan pasar, tarik menarik antara masyarakat yang telah mampu memanfaatkan hidup dengan keterbukaan atau transparansi antara bangsa-bangsa di dunia dengan kelompok masyarakat

yang masih beku, hidup dalam kesunyian dan terisolasi di dalam kelompoknya sendiri, tarik menarik antara masyarakat yang telah mampu bersaing global dengan masyarakat yang baru mampu hidup dalam tatanan lokal, tarik menarik antara masyarakat yang ingin membangun kehidupan bersama misalnya Eropa dengan masyarakat suatu negara yang justru cenderung terjadi disintegrasi seperti yang terjadi di negara kita, tarik menarik antara tuntutan kualitas dengan etos kerja dan mutu SDM yang tidak memadai pada berbagai sektor

kehidupan. Siapa yang menang dalam proses tarik menarik itu menumbuhkan dan menghadirkan berbagai tantangan hidup bangsa-bangsa di negara-negara yang kalah khususnya di negara kita, di antaranya adalah (1) tantangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi, (2) tantangan otonomi daerah dan demokratisasi, (3) tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Tantangan hidup itu dapat dinyatakan sebagai tantangan yang kontemporer yang perlu pemecahan multidimensi, meskipun demikian kali ini tinjauan hanya ingin dibatasi dari respon pendidikan yang melibatkan persoalan:

1. Respon pendidikan terhadap tantangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi
2. Respons pendidikan terhadap otonomi daerah dan demokratisasi
3. Kapasitas kelembagaan pendidikan dalam peningkatan kualitas pendidikan

Berdasarkan tiga persoalan itu maka persoalan yang hakiki yang dapat ditarik menjadi satu masalah pokok adalah: Bagaimana sistem pendidikan baik pada tingkat nasional, daerah maupun tingkat sekolah diselenggarakan, sehingga dapat menghasilkan SDM yang mampu menjawab semua tantangan itu.

### **RESPON PENDIDIKAN TERHADAP TANTANGAN GLOBALISASI DAN LIBERALISASI EKONOMI**

Problema globalisasi dan liberalisasi ekonomi ini telah banyak dibahas dalam berbagai forum. Namun, kali ini fenomena globalisasi dan liberalisasi ekonomi akan

dianalisis dari sisi respon pendidikan, artinya apa yang harus dilakukan dalam dunia pendidikan kita, agar kita masih tetap eksis dalam menghadapi berbagai tantangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi itu. Tantangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang akan berdampak pada kehidupan bersama pada dasarnya adalah produk yang diakibatkan oleh adanya globalisasi dan liberalisasi ekonomi itu. Menurut Attali (1999) pihak yang kalah dalam era globalisasi dan liberalisasi sebagai tanda kehidupan dalam milenium ketiga ini adalah kaum miskin. Menurut beliau "...di luar kawasan Pasifik dan Eropa, 4 milyar manusia terhuyung-huyung memasuki masyarakat demokrasi pasar" (Attali, 1999:69). Namun demikian lebih lanjut dijelaskan bahwa pasar itu sendiri tidak mampu membangun infrastruktur sistem kesehatan, pendidikan dan lingkungan hidup secara mendasar, sehingga pasar itu menyebabkan jurang yang semakin lebar antara kawasan maju dengan wilayah kumuh dan lumpuh. Meskipun negara-negara perbatasan mengeksport bahan-bahan mentah untuk ditukar dengan barang-barang pabrik, akan tetapi ketergantungan ekonomi negara-negara perbatasan dengan pasar di belahan bumi utara ini tidak dapat dihindarkan. Negara-negara yang berbatasan dengan negara-negara Pasifik khususnya Birma, Thailand, Indonesia, dan Philipina, menurut Attali (1999) lebih menjanjikan dari pada negara-negara yang berbatasan dengan negara-negara Eropa, sehingga negara-negara Asia itu yang dianggap sebagai "macan" masa depan beralasan karena ada bukti-bukti dukungannya kuat di antaranya, yakni (1) negara-negara

Asia telah mengalami perkembangan cepat mencapai lima kali lipat dari pada Afrika, dan (2) jumlah penduduk yang cukup besar di Indonesia mencerminkan banyaknya angkatan kerja bila dibandingkan dengan Eropa. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup besar ini akan efektif menjadi nilai tambah terhadap kehidupan bangsa apabila pertumbuhan ekonomi seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Seperti yang terjadi di Afrika percepatan pertumbuhan penduduk melampaui percepatan pertumbuhan ekonominya (Attali, 1999:71), sehingga besarnya jumlah penduduk justru tidak dapat dijadikan aset akan tetapi justru sebaliknya menjadi hambatan membangun kehidupan.

### Posisi Indonesia

Posisi hasil pendidikan Indonesia dalam globalisasi dan liberalisasi ekonomi ini kelihatannya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Paling tidak dalam kaitan dengan hubungan Utara-Selatan, maka Indonesia termasuk dalam kelompok negara-negara Selatan yang berada pada posisi negara-negara berkembang yang berhadapan dengan negara-negara belahan Utara yang termasuk negara maju, yang artinya tuntutan pembangunan kita tidak hanya terbatas menghadapi pasar global akan tetapi kita masih terjerat pada persoalan-persoalan dalam yang masih memerlukan pemecahan yang membutuhkan banyak dana, konsentrasi pemikiran yang strategik dan mutu SDM yang memadai. Kita masih memiliki produk dan jasa yang terbatas untuk dapat dipasarkan ke

luar. Meskipun angka ekspor kita pertahun tercatat sedikit lebih tinggi dari pada Australia, akan tetapi potensi ekspor itu tampaknya belum efektif untuk membangun ekonomi nasional, bahkan kehidupan negara kita masih sangat tergantung kepada hutang. Akhirnya pendanaan pendidikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah juga melibatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat yang masih berada pada posisi ekonomi di bawah nilai ambang normal.

### Bagaimana pendidikan di Indonesia?

Apabila diperhatikan hasil studi IAE (*Internasioanal Association for the Evaluation of Education Achievement*) yang dilakukan pada tahun 1999, maka hasil pendidikan kita menempati kedudukan yang jelek di antara negara-negara tetangga, maka tantangan global dan liberalisasi ekonomi ini jelas belum mampu kita hadapi dengan mengetengahkan SDM yang kita miliki, kecuali kita memperoleh kekuatan baru, semangat baru dan inspirasi baru yang dengan bersama-sama mampu menggerakkan pendidikan kita sehingga penyelenggaraan pendidikan kita benar-benar dapat diandalkan mampu menghasilkan SDM yang mandiri, kreatif dan kompetitif. Pendidikan kita masih berorientasi intrinsik, sentris pada kegiatan sekolah yang terisolasi dari permasalahan kemasyarakatan yang nyata. Bahkan yang dikotak-katik hanya terbatas pada timbunan pengetahuan, kompetisi NEM, dan bukan, proses pemberdayaan anak bangsa agar mereka mampu menghadapi dunia yang menunggui

mereka. Dari orientasi pendidikan kita itu tampak jelas bahwa pendidikan kita hanya memanfaatkan IQ siswa. Padahal IQ telah ditinggalkan sejak lama oleh negara-negara maju. Bangsa-bangsa di negara maju telah menyikapi perubahan zaman ini dengan arif, yang menyimpulkan bahwa IQ yang memiliki karakteristik linier-logik-sistematik itu tidak akan mampu digunakan untuk menghadapi masa depan dunia yang perubahannya tidak lagi linier Gibson, Ed. (1997). Pilihan mereka agar anak-anak siap menghadapi dunia akan datang yang berubah dengan cara tidak linier ini, adalah pada kekuatan kreativitas (CQ). Dengan menggunakan kreativitas, maka mereka dapat melihat masa depan dengan alternatif, dengan pilihan, dalam kerangka berfikir dan visi berpikir sistemik, dan dengan cara ini maka kemungkinan apa yang akan terjadi di masa depan dapat diperkirakan, yang menurut UNESCO dinyatakan sebagai *Professional Feeling Obsolescence* (Anonim, 1992:1). Pertumbuhan kreativitas ini dapat bekerja dengan baik apabila otak kita dihadapkan kepada rangsangan emosional, kinestetik, figural, dan sistemik. Bentuk-bentuk rangsangan mental ini sangat ditentukan oleh proses pembelajaran kita sehari-hari baik di sekolah maupun di luar sekolah dalam menghadapi kehidupan nyata. Oleh karena itu kematangan emosional (EI = *Emotional Intelligence*) juga mendukung potensi kreativitas seseorang. Ukuran keberhasilan pendidikan akhirnya tidak ditunjukkan dari indikator intrinsik dengan baiknya NEM akan tetapi justru pada kemampuan CQ, EI, dan telah dibuktikan di nagar-negara maju

bahwa *Adiversity Quotient* (AQ) yakni ketahanan manusia dalam menghadapi kesulitan hidup, sangat dominan menjadi ukuran keberhasilan manusia di masyarakat. Berarti apabila indikator keberhasilan pendidikan di sekolah berbeda dengan ukuran keberhasilan manusia di masyarakat, maka penyelenggaraan pendidikan kita justru hanya akan menyesatkan masa depan anak-anak kita, membelenggu wawasan hidup anak-anak kita, dan menipu anak-anak kita hanya disiapkan untuk menghadapi dunia yang telah tiada, yang tidak mungkin lagi mampu menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia yang perubahannya terjadi dengan cepat dan tidak menentu. Pendidikan kita hanya akan terjebak kepada masalah-masalah intrinsik pendidikan dan kurang mampu menyiapkan potensi anak-anak bangsa kita untuk mampu hidup di masyarakat. Berarti pendidikan kita hanya menciptakan pembororsan. Bila demikian untuk apa anggaran pendidikan diperbesar? Oleh karena itu sebelum anggaran pendidikan diperbesar langkah pertama atau bersama-sama adalah memperbaiki sistem pendidikan itu agar pendidikan mampu memberdayakan anak-anak bangsa mampu menghadapi kehidupan nyata, membuat anak-anak kita mampu mandiri, membuat anak-anak kita memiliki rasa percaya diri. Menurut *Quantum Learning* (De Porter & Hernacki, 1999) keberhasilan manusia sangat ditentukan oleh adanya rasa percaya diri mereka. Pendidikan kita baik di rumah, di sekolah dan di masyarakat tidak mengusahakan tumbuhnya rasa percaya diri anak, sebaliknya justru menghasilkan

manusia-manusia yang memiliki ketergantungan, yang pada ujung-ujungnya hanya akan menjadi beban sosial bangsa. Bekerja kepada orang atau lembaga lain menjadi pelayan untuk mendapatkan uang menjadi cita-cita mereka, yang menurut Kiyosaki & Lechter (2000) pikiran seperti ini adalah cermin pikiran orang miskin. Pendidikan seharusnya mampu menjadikan seseorang memiliki keahlian, memiliki kompetensi untuk berbuat sesuatu, dan dari keahlian serta kompetensinya ini mereka gunakan untuk mendukung kehidupannya. Orang-orang yang sadar terhadap keahliannya dan kompetensinya ini dapat dikatakan hanya dimiliki oleh mereka yang secara sadar keluar dari sistem belenggu pendidikan yang berlaku. Akibat sifat ketergantungan anak-anak bangsa kita ini mereka menggunakan ijazah untuk mencari pekerjaan, untuk menjadi pelayan orang atau lembaga tertentu. Walaupun mungkin mereka memiliki keahlian atau kompetensi, maka keahlian dan kompetensinya itu tidak digunakan untuk menghidupi dirinya, akan tetapi diabdikan untuk orang lain dengan imbalan memperoleh upah. Menurut Kiyosaki & Lechter (2000) keahlian mereka digunakan untuk memperkaya orang lain, sedangkan dirinya sendiri tetap menjadi orang miskin. Bagaimana SDM kita mampu berkompetisi, apabila bangsa kita masih dijangkiti virus kemiskinan dan dijerat oleh pikiran untuk menjadi pelayan?

### Bagaiman pendidikan seharusnya?

Telah banyak kritik dan pemikiran untuk mencari solusi pendidikan kita yang di tampilkan oleh

berbagai kalangan di negara kita, akan tetapi dampaknya terhadap pembangunan pendidikan nasional kita tampaknya tidak ada. Terus saja pendidikan yang selama ini dilakukan masih saja dianggap baik meskipun pada kenyataannya pendidikan kita semakin menyesatkan. Pendidikan kita yang jelas di masyarakat adalah menghasilkan gejala kenakalan remaja dan kriminalitas, apabila kita berasumsi bahwa satu orang jahat di masyarakat lebih banyak dari pada 1000 orang baik. Berapa banyak tawuran terjadi antar anak-anak sekolah, berapa banyak anak-anak kita tenggelam ke dunia "narkoba", berapa banyak anak-anak kita menjadi pelaku "curanmor", dapat digunakan sebagai indikator kongkrit hasil pendidikan kita. Bila dibandingkan dengan keadaan pendidikan di Jepang sensitivitas menangkap gejala pendidikan di negara kita masih sangat rendah. Di Jepang lembaga pendidikan sangat cepat menangkap gejala dampak pendidikan Matematika terhadap terjadinya kenakalan remaja dan kriminalitas, dan dari hasil kajian memberi pemecahan tindakan terhadap pendekatan pendidikan Matematika yang digeser tidak lagi menggunakan pendekatan *Mathematical thinking* akan tetapi dengan menggunakan pendekatan *Trial and error* untuk memperoleh kemampuan *Mathematical thinking*. Sumber kesesatan pendidikan kita adalah adanya ambisi yang terlalu besar dari pihak pemerintah pusat untuk mengendalikan pendidikan di negara kita, yang akhirnya melahirkan sistem sentralisasi dan uniformitas pendidikan yang diberlakukan bagi seluruh pendidikan di negara kita yang dikenal

sebagai negara yang memiliki keanekaragaman sangat tinggi ini.

Penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional seharusnya tidak diartikan sebagai segala-galanya, cukup dibatasi pada beberapa hal misalnya:

1. Satunya dalam jenjang pendidikan, yakni TK, (SD, SLTP), SLTA dan PT
2. Satunya dalam jenis pendidikan misalnya pendidikan umum, Pendidikan kejuruan, pendidikan guru dan pendidikan anak-anak *handicaped*
3. Satunya kurikulum yang bernilai dan berdampak nasional menjadi perekat dalam mempersatukan kehidupan bangsa, yakni Pancasila, Pendidikan Agama, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia

Meskipun kita memiliki satu sistem dalam beberapa hal tentang pendidikan kita, demokratisasi pendidikan adalah suatu tuntutan yang harus diwujudkan di negara kita, oleh karena itu maka pada pelaksanaannya di tingkat praksis harus dilaksanakan dengan fleksibel.

## TANTANGAN TERHADAP OTONOMI DAERAH

Terkait dengan adanya otonomi daerah, maka otonomi daerah janganlah sekedar diartikan sebagai pelimpahan wewenang kekuasaan pusat ke daerah, akan tetapi harus dimaknakan sebagai kearifan kita bersama untuk mewujudkan tatanan kehidupan demokratis di negara kita yang berdampak lebih lanjut pada terjadinya demokratisasi pendidikan sampai pada tingkat praksis yakni

sekolah. Apabila diungkapkan secara selintas dari UU.22/1999, maka otonomi daerah yang memiliki implikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di antaranya adalah:

1. Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Pasal 4, ayat 1).
2. Daerah-daerah di atas masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkhi satu sama lain (Pasal 4, ayat 2).
3. Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan/atau digabung dengan daerah lain (Pasal6, ayat1).
4. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain (pasal 7, ayat1).
5. Kewenangan bidang lain selain dalam hala-hal lain juga dalam hal pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional (pasal 7, ayat2).
6. Kewenangan pemerintahan kepada Daerah ini adalah dalam rangka desentralisasi yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (Pasal 8, ayat1)

Terkait dengan kepentingan pendidikan, maka beberapa pasal dan

ayat dari UU.22/1999 itu dapat digunakan sebagai dasar berpijak dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikan kita. Namun demikian meskipun pengalihan kewenangan pusat ke daerah itu mencakup pengalihan kekuasaan pusat ke daerah dalam desentralisasi tetapi harus tetap berada dalam atap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti yang diatur dalam Pasal 2, ayat (1). Artinya apabila kita memiliki undang-undang bahwa pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, maka di satu pihak pemerintah pusat tidak harus menangani segala permasalahan pendidikan nasional kita, dan di pihak lain meskipun daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang dianggap terbaik bagi daerah masing-masing, maka daerah tetap mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sistem pendidikan yang diatur secara nasional, meskipun pelaksanaannya tetap fleksibel dalam tataran praksis. Sesuai undang-undang itu persoalan pengembangan SDM adalah menjadi wewenang daerah, yang berarti daerah memiliki kewajiban untuk memajukan pendidikan daerah masing-masing, sehingga mampu menyediakan SDM dasar untuk memenuhi kepentingan minimal SDM daerah itu. Untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan SDM daerah, maka daerah juga memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan yang dianggap tepat bagi daerah itu, karena daerah juga diberi wewenang untuk bekerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan luar negerai, dengan sendirinya juga memuat pengertian termasuk daerah lain yang dipandang

bermanfaat bagi masing-masing daerah sesuai isi Pasal 88, ayat 1. Meskipun antara daerah yang bekerjasama tidak harus memiliki hubungan hirarki.

### **Kebijakan Pendidikan Daerah**

Bertolak dari berbagai ketentuan hukum di atas, maka setiap daerah dapat mengembangkan pendidikan sesuai dengan kepentingan daerah masing-masing, baik pendidikan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Peran pendidikan di rumah perlu diatur daerah, sehingga orang tua tidak lagi hanya menyerahkan pendidikannya kepada sekolah. Daerah juga perlu memperjelas kedudukan pendidikan di masyarakat, sehingga peran masyarakat dalam pendidikan juga menjadi lebih jelas. Masyarakat yang terorganisasi dalam berbagai organisasi masyarakat baik organisasi seni, olah raga, arisan, koperasi, bahkan organisasi politik, maka daerah diharapkan mampu mengendalikan peran berbagai organisasi masyarakat itu dalam pendidikan. Organisasi masyarakat oleh daerah harus ditempatkan sebagai "Instrumen Pendidikan" yang mendidik warga anggotanya menjadi manusia terdidik, manusia sosial, manusia yang melek finansial, dan manusia yang arif terhadap persoalan-persoalan global, tidak terjebak pada wawasan pemikiran yang sempit, sehingga terjerumus kepada tindakan-tindakan konflik yang menjurus ke arah tindak destruktif, lebih-lebih terjerumus menjadi pelaku dan pemicu terjadinya disintegrasi bangsa. Untuk memajukan pendidikan di sekolah, maka pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan lembaga/badan baik antar

daerah maupun dengan lembaga/badan di luar negeri sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

### **Pengembangan Kurikulum**

Bidang studi atau matapelajaran yang memiliki muatan global misalnya Matematika, IPA, Bahasa Asing dan Teknologi dapat dirancang oleh daerah meskipun harus tetap fleksibel pelaksanaannya pada tingkat praksis, mencakup baik kurikulum, maupun pada implementasinya. Apabila dirasa daerah tidak mampu merencanakan kurikulum dan mewujudkan pendidikan bidang studi atau matapelajaran global itu karena kekurangan SDM, maka daerah dapat bekerjasama dengan lembaga/badan baik dari daerah lain atau dari luar negeri yang dianggap terbaik untuk diajak kerjasama. Sedangkan Ilmu-ilmu lain, misalnya IPS, Seni, Olah Raga dan sebagainya dapat dirancang di tingkat daerah ataupun di tingkat sekolah sesuai dengan kepentingan daerah dan sekolah masing-masing. Agar kurikulum dan implementasinya dapat dirancang dan dilaksanakan secara proporsional, maka daerah diharapkan memiliki visi dan misi pendidikannya yang jelas, misalnya untuk DIY dengan visi "Pendidikan Berwawasan Budaya".

### **KAPASITAS KELEMBAGAAN PENDIDIKAN**

Kelembagaan pendidikan dapat dibedakan sesuai dengan fungsinya yakni (1) Lembaga administrasi pendidikan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan, dan (2) Lembaga edukatif yang dengan nyata menyelenggarakan pendidikan itu

sendiri. Kapasitas kelembagaan admistratif tentunya terfokus kepada perangkat institusi pemerintahan baik pusat maupun daerah yang mengurus segala administrasi penyelenggaraan pendidikan, meliputi (1) perencanaan program menyeluruh penyelenggaraan program pendidikan sesuai dengan tingkat birokrasi masing-masing, (2) menetapkan indikator keberhasilan pendidikan, (3) memfasilitasi sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan keberhasilan pendidikan, (4) mengangkat, memutasikan dan memberhentikan guru sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, (5) menetapkan perangkat supervisi untuk monitoring dan evaluasi keterlaksanaan program pendidikan di setiap institusi pendidikan, dll. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan bagi pendidikan sekolah adalah setiap satuan pendidikan dari tiap jenjang pendidikan, yang bertugas melaksanakan pendidikan yang sebenarnya, dan bertanggung jawab terhadap tercapainya program pendidikan, khususnya dalam mencapai kompetensi lulusan dari setiap jenjang pendidikan. Bila kita sependapat bahwa pelaku belajar dalam sistem pendidikan kita adalah siswa, maka semua perangkat pendidikan eksternal siswa baik itu guru, kepala sekolah, maupun perangkat administrasi pendidikan adalah fasilitator sesuai dengan karakteristik tugas masing-masing. Guru memfasilitasi kegiatan belajar siswa, perangkat administrasi memfasilitasi dana, sarana dan prasarana yang diperlukan guru untuk kegiatan pembelajaran. Namun demikian sekarang ini fungsi-fungsi administratif rancu dengan fungsi-fungsi edukatif. Perangkat administratif



sering campur tangan terlalu jauh memasuki kasanah edukatif, bahkan seakan-akan perangkat adminstratif itu memiliki kuasa untuk menentukan corak pendidikan di wiliayah birokrasinya. Guru kehilangan otoritas dan kreativitas untuk melakukan proses pembelajaran yang dianggap terbaik bagi siswanya. Di negara kita berlaku hukum tidak tertulis atau mungkin disebut konvensi yang memberlakukan kekuasaan bagi (1) birokrator pendidikan, (2) penyandang dana pendidikan, untuk menentukan segala corak penyelenggaraan pendidikan. Padahal perangkat struktural pendidikan kita telah lengkap termasuk adanya Balai Penataran Guru (BPG) untuk pembinaan profesi guru, adanya Pusat Penyelenggaraan Penataran Guru Bidang Studi (PPPG), yang seharusnya pada lembaga-lembaga ini mutu guru ditingkatkan. Sejalan dengan peningkatan mutu guru ini, seharusnya supervisi dilaksanakan berdasarkan perkembangan peningkatan mutu guru itu, akan tetapi di dalam kenyataannya upaya peningkatan mutu guru ini tidak sejalan dengan penyelenggaraan supervisinya. Penilik yang melakukan supervisi bidang studi justru dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki keahlian bidang studi, sehingga mereka hanya mampu mensupervisi keberadaan perangkat adminsitratif guru dari pada kenyataan guru dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. Akibatnya aktivitas pembelajaran guru dilaksanakan sesuai selera dan persepsi masing-masing. Pimpinan sekolah sering juga tidak memiliki persepsi terhadap hakekat tiap bidang studi dengan konsekensi proses pembelajarannya, yang hal ini dapat

berdampak fatal bagi pelaksanaan pembelajaran bidang studi tertentu. Pendidikan yang partisipatif tidak akomodatif, masih tergeser oleh pendidikan informatif yang berlindung di bawah konsep pembelajaran dengan *delivery systems*. Konsep pembelajaran dengan sistem penyampaian ini membuat kelas didominir guru, dengan alasan praktis pengelolaan kelas mudah karena siswa diam, dan pembelajaran dengan cara demikian yang sebagian besar di antara kita menganggap merupakan sistem manajerial kelas yang baik. Namun tidak pernah dirunut apa dampak negatif dari sistem pembelajaran informatif ini bagi siswa. Harapan lembaga pendidikan adalah satu yakni NEM siswa di sekolahnya tinggi, apapun cara pembelajaran yang dilakukan guru. Dari titik tolak ini, maka proses pembelajaran hanya di arahkan kepada besarnya timbunan pengetahuan pada siswa yang harapannya dapat direproduksi kembali pada saat-saat evaluasi dilakukan, sehingga kembali lagi bahwa pendidikan kita hanya mengakomodasikan kapasitas IQ siswa bukan kreativitas mereka. Kapasitas IQ-pun hanya sebatas kemampuan menghafal bukan kemampuan berpikir yang lain, sehingga apabila siswa telah lupa terhadap apa yang dihafal, maka mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Materi yang dihafalpun terbatas pada mataeri tekstual, bukan pemahaman terhadap materi kontekstual yang terkait dengan gejala kehidupan nyata yang dihadapi mereka sehari-hari. Dalam kondisi kapasitas kelembagaan pendidikan kita seperti ini, bagaimana anak-anak bangsa kita mampu bersaing global?

Otonomi daerah yang juga berarti desentralisasi sebenarnya dapat menjadi harapan demokratisasi pendidikan, akan tetapi apabila otonomi daerah ditanggapi hanya sekedar mengalihkan kekuasaan pusat ke daerah, justru hanya akan menumbuhkan raja-raja kecil di setiap struktur birokrasi, yang akan berdampak lebih parah terhadap penyelenggaraan sistem pendidikan di negara kita. Otonomi daerah yang direspons secara arif, seharusnya berdampak tumbuhnya *School Based Management* (SBM) (Gamage, 1992) yang memberikan peluang setiap sekolah untuk mengembangkan diri sesuai dengan ukuran terbaik bagi siswa, bagi orang tua siswa, bagi guru, bagi masyarakat dan bagi kepala sekolah sendiri. Prinsip SBM membuat institusi sekolah transparan dengan semua *stakeholder* sekolah, termasuk juga masuknya masyarakat dalam ikut serta memberikan pengalaman belajar siswa terhadap pengalaman-pengalaman hidup nyata.

## DAFTAR ACUAN

- Anonim. 1999. *Undang-undang Otonomi Daerah 1999*. Sinar Grafika, Jakarta
- Attali, J. 1999. *Milenium Ketiga*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- De Porter, B. & Hernacki, M. 2000. *Quantum Learning*. Penerbit Kaifa, Bandung
- Gamage, D.T. 1992. "A Comparative Study of the School Based Management Pursued by Victoria and New South Wales". In : *Rationalizing Education*. Melbourne Studies of Education. Australia.
- Gibson, R. Ed. 1997. *Rethinking the Future*. Nicolas Brealey Publishing, London.
- Gregorio, L.C. 1992. "Information Technology Towards Quality Improvement of Teacher Education". In: *Education in Asia and the Pacific*. UNESCO. Bangkok.
- Kiyosaki, R.T. & Lechter S.L. 2000. *Rich Dad, Poor Dad*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta